



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LKjIP 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 34 A Pati Kode Pos 59115  
Telepon : (0295) 381842 Website : [//inspektorat.patikab.go.id](http://inspektorat.patikab.go.id)  
Faksimile : (0295) 381025 E-mail : [inspektorat@patikab.go.id](mailto:inspektorat@patikab.go.id)

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN ANGGARAN 2020

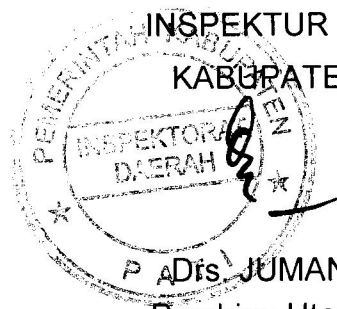
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pati.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pati, 26 Februari 2021

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PATI



P ADrs JUMANI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701114 199011 1 001



## **KATA PENGANTAR**

Bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati Tahun 2020 dapat diselesaikan. LKjIP disusun guna memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Pati yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

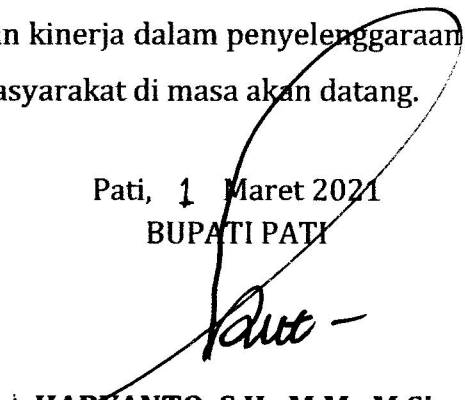
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 mengalami penurunan capaian kinerja terutama angka kemiskinan, pendapatan perkapita masyarakat dan angka pengangguran di Kabupaten Pati. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi wabah Covid-19. Angka kemiskinan ditarget 9,18 % karena pandemi covid Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 10,08 %. Demikian pula pendapatan perkapita mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Target pendapatan

perkapita sebesar Rp. 35.730.568,- realisasi tercapai Rp. 34.180.000,-. Pandemi virus corona (Covid-19) menginfeksi di berbagai kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Pada perekonomian sendiri pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II lalu minus 5,32%. Dari sektor ketenagakerjaan misalnya, berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan terobosan sesuai kebijakan dari Pemerintah Pusat, dengan melakukan refocusing anggaran sehingga dapat mengurangi dampak pandemi covid-19 dengan memberikan bantuan pangan kepada warga yang terpapar covid-19 dan dilakukan isolasi ditempat-tempat isolasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020, serta menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di masa akan datang.

Pati, 1 Maret 2021  
BUPATI PATI

  
**HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.**

## DAFTAR ISI

Halaman:

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pemerintahan.....	1
1.2 Kepegawaian.....	3
1.3 Kondisi Geografis dan Iklim Daerah.....	3
1.4 Gambaran Umum Demografi.....	6
1.5 Isu-isu Strategis.....	8
1.6 Sistematika.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pati 2017-2022.....	11
2.2 Indikator Kinerja.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja.....	15
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	21
3.2.1 Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya.....	21
3.2.2 Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan.....	22
3.2.3 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia.....	24
3.2.4 Penurunan tingkat kemiskinan.....	26
3.2.5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	29
3.2.6 Peningkatan Kesempatan Kerja Lokal dan Produktifitas Daerah.....	33
3.2.7 Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.....	34
3.2.8 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.....	37
3.2.9 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.....	38
3.2.10 Menurunnya resiko bencana.....	40
3.3 Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV PENUTUP.....	46
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman:
1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Umur Tahun 2020	7
1.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2020	7
2.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	12
2.2	Matrik Program Kegiatan dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pati 2020	15
2.3	Target Belanja Daerah	18
2.4	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2020	18
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	20
3.3	Capaian Kinerja Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketentraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	21
3.4	Perbandingan Data Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	21
3.5	Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kualitas serta Pemerataan Akses Pendidikan	23
3.6	Perbandingan Data IPM	23
3.7	Capaian Kinerja Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia	24
3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	25
3.9	Capaian Kinerja Penurunan Tingkat Kemiskinan	26
3.10	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini dan PDRB Perkapita Th. 2016-2020	28
3.11	Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	29
3.12	Perbandingan Data Indikator Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	31
3.13	Capaian Kinerja Peningkatan Kesempatan Kerja Lokal dan Produktifitas Daerah	33
3.14	Capaian Kinerja Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi dan daya Saing Daerah	34
3.15	Perbandingan data per tahun Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	35

Tabel	Judul	Halaman:
3.16	Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan konektivitas wilayah	37
3.17	Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	38
3.18	Perbandingan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	39
3.19	Capaian Kinerja Menurunnya resiko bencana	40
3.20	Kejadian Bencana tahun 2020	41
3.21	Perbandingan Indeks Resiko Bencana	42
3.22	Pembuatan Sumur Dalam	43
3.23	Anggaran Belanja Daerah Perubahan	44
3.24	Realisasi anggaran belanja prioritas (dalam rupiah) Tahun 2020	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman:
1.1	Peta Kabupaten Pati	4
3.1	Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati	32
3.2	Aksi Penanaman Mangrove di Desa Kertomulyo Kec. Trangkil	40
3.3	Bencana Banjir di Desa Banjarsari Kecamatan Gabus – 21 Desember 2020	41
3.4	Bencana Tanah Longsor di Desa Gunungwungkal Kecamatan Gunungwungkal - 11 Desember 2020	42
3.5	Bencana Kekeringan di Desa Kedungmulyo Kecamatan Jakenan - 09 Oktober 2020	42



## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman:
1.1	Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020	3
3.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Tahun 2020	44

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
I	Perjanjian Kinerja Tahun 2020

## BAB I PENDAHULUAN

**T**ujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut *Good Governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu perwujudan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Sesuai Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### 1.1 PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sejak otonomi daerah pada tahun 2001, jumlah kecamatan di Kabupaten Pati tidak mengalami perubahan yaitu 21 kecamatan. Pada tahun 2006 jumlah desa/kelurahan bertambah menjadi 406 desa/kelurahan dari 405 desa/kelurahan, karena ada pemekaran desa di Kecamatan Gabus yaitu Desa Pantirejo, yang dipecah menjadi dua desa yaitu Desa Pantirejo dan Desa Kosekan. Tahun 2017 sampai dengan 2018 jumlah RT/RW sebanyak 7.252 RT dan 1.483 RW, tahun 2019 sampai dengan 2020 ada 7.556 RT dan 1485 RW.

Pemerintah Kabupaten Pati telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan struktur organisasi di Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 39-64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah; Peraturan Bupati Pati nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bupati Pati nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah; Peraturan Bupati Pati nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; serta Peraturan Bupati Pati nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perangkat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 21 Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Tahun 2017 diadakan pemilihan kepala daerah, hasil akhir rekapitulasi suara secara menyeluruh menunjukkan pasangan calon (Paslon) Haryanto-Saiful Arifin (Harfin), keluar sebagai pemenang Pilkada di Bumi Mina Tani. Paslon tunggal yang diusung oleh delapan partai itu mendapat 519.675 suara, dari total 697.437 suara sah, dalam gelaran pilkada kali ini suara tak sah yang ada mencapai 14.984 sehingga total suara sah dan tidak sah, mencapai 712.421 suara. Jika dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pati yang mencapai 1.034.256, maka tingkat partisipasi pemilih yang ada sekitar 68,9 persen, hal ini jauh di bawah target partisipasi yang dipatok KPU Pusat dalam gelaran Pilkada serentak 2017, yakni 77,5 persen.

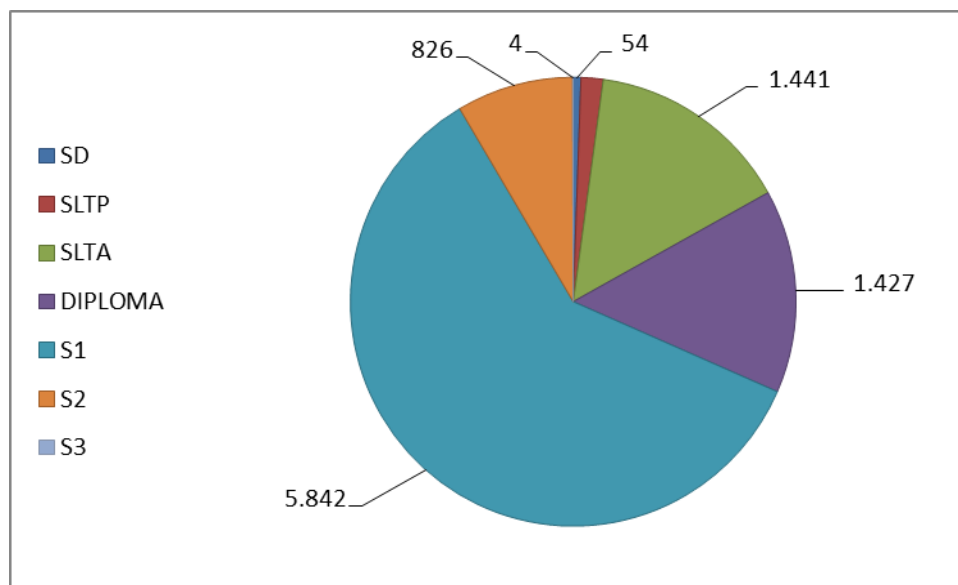
Pemilu legislatif dilaksanakan tahun 2019 menghasilkan 50 orang Anggota DPRD Kabupaten Pati 2019-2024 yang berdasarkan keanggotaan Partai Politik didominasi oleh PDI-P sebanyak 10 orang atau 20 persen dan Partai Perindo di posisi terakhir dengan 1 kursi. Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PKB menempati urutan terbanyak kedua dengan masing-masing 6 kursi. Kemudian disusul oleh PPP, Partai Golongan Karya dan Partai Nasdem menduduki masing-masing 5 kursi, sedangkan PKS dan Partai Hanura sebanyak 3 kursi.

## 1.2 KEPEGAWAIAN

Jumlah PNS terbanyak pada tahun 2020 adalah golongan III sebanyak 4.831 atau 49,5% dari total pegawai 9.750 orang. Proporsi terbanyak ini sama seperti pada tahun 2019 dimana jumlah PNS terbanyak juga golongan III sebanyak 5.064 atau 48% dari total pegawai 10.551 orang.

Selanjutnya perbandingan PNS menurut pendidikannya adalah sebagai berikut :

**Grafik 1.1**  
**Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020**



Sumber : Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati Th. 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan formal PNS di Kabupaten Pati yang terbanyak adalah Sarjana (S-1) sebanyak 5.842 orang atau 59,92 persen.

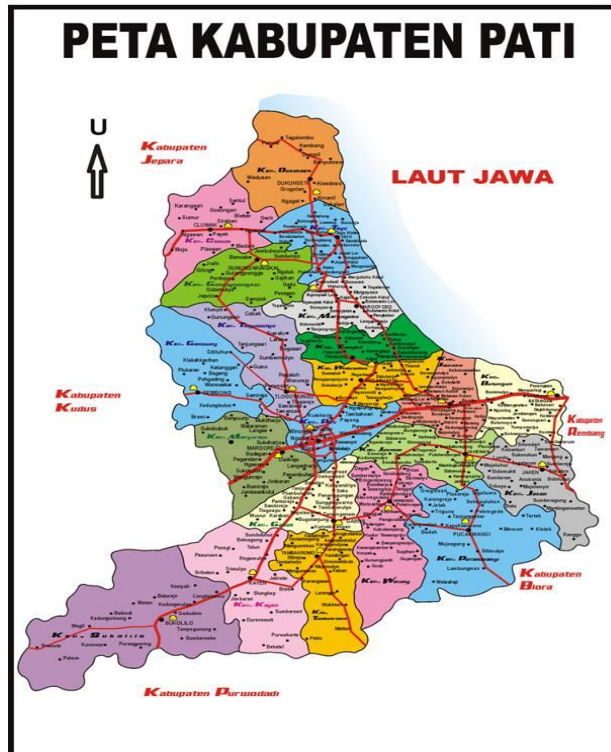
Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

## 1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAN IKLIM DAERAH

Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak antara 100<sup>o</sup>,50' - 111<sup>o</sup>,15' Bujur Timur (BT) dan 6<sup>o</sup>, 25' - 7<sup>o</sup>,00'Lintang Selatan (LS) dan mempunyai luas wilayah 150.368 Ha. Sedangkan secara geografis posisi kabupaten pati sangat strategis karena berada diantara kota-kota pesisir utara Pulau Jawa dan dilalui jalan nasional Pantura yang menghubungkan kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya. Wilayah Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Rembang dan Laut

Jawa di sebelah timur, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, dan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan. Secara administratif Kabupaten Pati terbagi dalam 21 Kecamatan yang terdiri dari 401 Desa dan 5 Kelurahan.

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Pati



Secara topografi, wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu : lereng Gunung Muria, membentang sebelah barat bagian utara; dataran rendah, membujur di tengah sampai utara; serta pegunungan kapur yang membujur di sebelah Selatan.

Dengan kondisi topografi demikian, Kabupaten Pati memiliki variasi ketinggian antara 2 – 624 mdpl, daerah terendah adalah Kecamatan Gabus dengan rata-rata ketinggian 3,92 mdpl, sedangkan daerah tertinggi adalah kecamatan Gembong dengan rata-rata ketinggian 219,36 mdpl yang merupakan wilayah lereng Gunung Muria.

Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah bagian utara dan daerah bagian selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara meliputi tanah red yellow, latosol, aluvial, hidromer, dan regosol. Sedangkan di bagian selatan terdiri dari tanah aluvial, hidromer, dan gromosol.

Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum, di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di Kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Sayangnya, pada musim kemarau, kebanyakan dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap.

Secara keseluruhan iklim dipengaruhi oleh letak geografisnya. Maka dari itu, Kabupaten Pati beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering.

Sedangkan rata-rata curah hujan pada tahun 2020 sebanyak  $\pm$  27.042 mm dengan 197 hari hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan sebesar 9.036 mm dengan hari hujan 31 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan curah hujan sebesar 27 mm dengan hari hujan sebanyak 3 hari.

Penggunaan lahan di Kabupaten Pati menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 terdiri dari 66.673 ha (45,29%) lahan sawah dan 80.545 ha (54,71%) lahan bukan sawah. Sedangkan menurut RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, Peruntukan Wilayah Kabupaten Pati terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Apabila dirinci luasan penggunaan kawasan Budidaya di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 21.586 Ha dibagi menjadi hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.695 Ha dan hutan produksi tetap dengan luas 19.891 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dengan luas kurang lebih 59.332Ha.

3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 2.249Ha.

4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: perikanan tangkap, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar dan pengolahan ikan. Kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil dari pantai, kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil dari garis pantai, dan kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area tangkapan lebih dari 6 mil garis pantai. Luas perikanan budidaya tambak mencapai 10.606 Ha, dan pengembangan perikanan budidaya air tawar mencapai 294 Ha.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas : Mineral, batu bara dan Minyak serta gas bumi.

6. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, menengah, kecil dan industri rumah tangga.

a. Pengembangan industri besar dan menengah, industri manufaktur berlokasi di Kecamatan Margorejo (306Ha) dan Kecamatan Pati (200Ha).

b. Industri manufaktur dan perikanan yang berlokasi di Kecamatan Batangan (318Ha), Kecamatan Juwana (102Ha).

c. Industri agro dan pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Tayu (30Ha), Kecamatan Trangkil (24Ha), Kecamatan Margoyoso (53Ha), Kecamatan Tambakromo (300Ha), Kecamatan Kayen (48Ha), Kecamatan Sukolilo (117Ha).

d. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.

## 8. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan dimasing-masing kecamatan yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

Di samping beberapa potensi wilayah yang bisa dikembangkan, Kabupaten Pati juga merupakan satu dari 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Kabupaten Pati merupakan daerah yang beresiko tinggi terjadi bencana dengan skor 174 atau kategori tinggi dan menempati peringkat 7 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Ada beberapa bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Pati. Pada musim penghujan Kabupaten Pati merupakan daerah yang rawan terhadap bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor maupun angin topan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Pati yang memiliki 93 sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Selain itu Kabupaten Pati juga memiliki wilayah dengan tingkat kemiringan lebih dari 40% dan wilayah yang rawan longsor yaitu wilayah Kecamatan Cluwak, Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong dan Pucakwangi. Sedangkan pada musim kemarau di sebagian wilayah Kabupaten Pati juga terjadi bencana kekeringan. Sebagai kabupaten dengan garis pantai yang cukup panjang ( $\pm 60$  km), bencana gelombang ekstrim dan abrasi juga bisa terjadi di kabupaten ini. Lebih lanjut menurut Badan Geologi, di sebagian wilayah Kabupaten Pati mempunyai tingkat ancaman rendah sampai dengan tinggi untuk bencana gempa bumi. Di Kabupaten Pati pernah menjadi episenter gempa bumi pada tahun 1890 M.

### 1.4 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Komposisi penduduk di Kabupaten Pati bila diamati dari piramida penduduk pada tahun 2020 menuju ke arah yang lebih baik, ditunjukkan dengan adanya arah perkembangan penduduk yang hampir sama dari penduduk usia 0-4 tahun sampai dengan penduduk usia 45-49 tahun. Komposisi penduduk juga dapat dihubungkan dengan Dependency Ratio (DR) / Angka Ketergantungan, yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun) dan (65 keatas).

Angka ketergantungan tahun 2020 sebesar 45,86 persen, berarti setiap 100 penduduk yang produktif menanggung sekitar 46 penduduk yang tidak produktif.

Jumlah penduduk Kabupaten Pati dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada tabel indikator kependudukan Kabupaten Pati, namun tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,48 persen lebih rendah dibanding tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 0,50 persen. Dengan luas wilayah sekitar 1.503 kilometer persegi rata-rata setiap kilometer persegi ditempati penduduk sebanyak 842 jiwa / kilometer persegi pada tahun 2020. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga beban lingkungan hidup juga semakin tinggi. Sex ratio tahun 2020 nilainya lebih kecil dari 100 persen yaitu sebesar 93,89 persen, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Umur Tahun 2020**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0 – 4	46.753	43.933	90.686
5 – 9	51.866	48.576	100.442
10 – 14	50.336	47.116	97.452
15 – 19	48.38	46.438	95.76
20 – 24	51.261	49.803	101.064
25 – 29	50.523	50.087	100.10
30 – 34	47.549	47.889	95.438
35 – 39	51.396	53.24	105.120
40 – 44	52.065	53.047	105.112
45 – 49	46.936	49.056	95.992
50 – 54	44.879	48.396	93.275
55 – 59	40.518	42.295	82.813
60 – 64	34.570	34.703	69.273
65 -- 69	22.678	21.135	43.813
70 --74	12.503	15.524	28.027
75 +	14.533	19.910	34.443
Jumlah	667.004	671.632	1.338.636

*Sumber: Data Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Pati 2020*

Jika dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 ada pada kelompok usia produktif (35-39 th dan 40-44) dan yang terendah ada pada kelompok usia tidak produktif (usia 70-74 th). Sedangkan kalau dilihat dari perbandingan atas jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak 0,34 persen dari penduduk laki-laki.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019- 2020**

JENIS KELAMIN	TAHUN 2019	%	TAHUN 2020	%
LAKI-LAKI	663.030	49,98	667.004	49,83
PEREMPUAN	663.451	50,02	671.632	50,17
TOTAL	1.326.481		1.338.636	

*Sumber: Diolah dari Data Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Pati 2020*

Sedangkan berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati menempati urutan ke-14 diantara 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 2016-2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati cenderung menurun.

## 1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Tahun 2020 merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2017 – 2022. Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pati serta memperhatikan lingkungan strategis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 termasuk di dalamnya kebijakan pembangunan pada tahun 2020.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multi dimensional dan sangat penting untuk ditangani secara terpadu dan terarah melalui pelibatan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, terlebih dimasa pandemi Covid 19.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, diikuti dengan lesunya iklim usaha serta meningkatnya angka pengangguran yang merupakan dampak dari pandemi covid 19 yang terjadi, membutuhkan perhatian khusus dari para pemangku kepentingan untuk bisa memberikan terobosan-terobosan yang efektif dalam menuntaskan permasalahan kompleks yang ada.

Perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan serta upaya pencegahan penyakit menular. Hingga Juni 2020 atau pertengahan tahun 2020 tercatat ada 7 ibu meninggal saat proses melahirkan padahal sepanjang 2019 tercatat 11 AKI (Angka Kematian Ibu), sehingga tahun 2020 dinilai mengkhawatirkan dan menjadi perhatian serius. AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) dapat ditekan bilamana ibu hamil yang ada di Kabupaten Pati dipastikan telah diperiksa sesuai standar kesehatan. Selain itu, harus dipastikan pula proses persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yaitu: 1. Persalinan harus dengan 4 tangan, 2. Mewajibkan persalinan di fasilitas Kesehatan, 3. Konsultasi dengan ahli misalnya dokter spesialis turun ke Puskesmas, 4. Gemar Baku KIA atau Gerakan Mari Membaca Buku Kesehatan Ibu dan Anak, 5. Bidan Desa harus bertempat tinggal di desa, 6. Gerak Sehat Ratri (Gerakan Rabu Minum Tablet Tambah pada Remaja Putri). Selain itu, selama masa pagebluk ini, juga membekali ibu hamil dengan rapid test yang disiapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pati, salah satunya diperuntukkan kepada ibu hamil.

Sejalan dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu adanya perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan meliputi penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya aparatur, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Di tengah ketidakpastian harga komoditas pangan yang cenderung kian merangkak naik sehingga menggerus daya beli masyarakat kelas menengah bawah dan juga mendorong inflasi yang cukup signifikan, perlu upaya untuk membuat kebijakan yang difokuskan pada aspek ketersediaan, aksesibilitas dan afordabilitas (harga terjangkau). Disamping itu pembenahan tata niaga komoditas pangan perlu diawasi sehingga dapat menutup celah para spekulan yang ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis komoditas yang sangat strategis ini. Diperlukan upaya sinergitas antar sektor yang menangani sehingga tidak lagi terjadi perdebatan antar pemangku kepentingan yang cenderung saling menyalahkan atau mencari pembenaran sepihak.

Era perdagangan bebas telah memasuki tahap implementasi yang kian waktu semakin luas cakupannya baik dari aspek geografis, produk atau komoditas yang diperdagangkan serta kesepakatan-kesepakatan teknis hubungan multilateral dalam perpektif perdagangan bebas.

Dampak negative dari implementasi perdagangan bebas internasional/regional baik *ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)* maupun *ASEAN Economic Community (AEC)* yaitu pada aspek daya saing produk UMKM. Mengingat masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan bisnisnya seperti kualitas SDM rendah, sulitnya akses pada sektor keuangan, rendahnya penguasaan teknologi produksi, inovasi maupun pada segi pemasaran.

Pemerintah Daerah harus terus berupaya mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai fasilitasi maupun bantuan teknis/permodalan guna mengangkat daya saing mereka ke tingkat yang lebih kompetitif.

Dan tentunya dalam mendorong pengembangan usaha UMKM didasarkan pada penggalan, pemanfaatan serta pengelolaan potensi sumber daya yang ada sehingga mampu menghasilkan produk yang tidak hanya memiliki keunggulan komparatif tetapi juga produk yang kompetitif.

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Baik buruknya infrastruktur akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, pengentasan kemiskinan maupun mutu lingkungan hidup.

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Pati dalam kategori baik, dihitung dari rerata prosentase tercukupinya kapasitas air baku daerah, daerah irigasi dalam kondisi baik, jalan kondisi baik dan jembatan kondisi baik.

## **1.6 SISTEMATIKA**

Penyusunan LKjIP Kabupaten Pati Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan Tujuan, Sasaran setrategis dan indikator RPJMD yang digunakan dalam RKPD dan perjanjian kinerja tahun 2020, program beserta anggarannya.

**BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran, serta analisis capaian kinerja.

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

**LAMPIRAN :**

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
- 2) Lain-lain.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

**P**erencanaan pembangunan Kabupaten Pati mengikuti hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, arah pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pati 2017-2022**

Tujuan pembangunan daerah menjabarkan atau mengimplementasikan pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu 5 tahun, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari 8 (delapan) misi Bupati terpilih.

Sasaran menjabarkan tujuan berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor: 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 dilakukan pemeriksaan penyelarasan sasaran pembangunan daerah dengan RPJMN.

**Tabel 2.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

<i>TUJUAN</i>	<i>INDIKATOR TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
<b>Misi 1 Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;</b>		
1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat</li> <li>• Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai nilai budaya</li> </ul>
<b>Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan</b>		
2. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat</li> <li>• Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan</li> </ul>
3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan</li> </ul>
	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	
<b>Misi 3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan</b>		
4. Penurunan tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan Indeks Gini PDRB Perkapita (Rp.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin</li> <li>• Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> </ul>
<b>Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan public</b>		
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten</li> <li>• Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah</li> </ul>
<b>Misi 5: Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja</b>		
6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	Nilai PDRB ADHK (=000.000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya produktivitas tenaga kerja</li> <li>• Meningkatnya produktivitas KUM</li> </ul>
<b>Misi 6: Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.</b>		
7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya produktivitas dan inovasi di bidang/sector pertanian, perdagangan dan industry</li> <li>• Meningkatnya Investasi Daerah</li> <li>• Meningkatnya daya saing daerah</li> <li>• Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat</li> </ul>
	Inflasi daerah (%)	
<b>Misi 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.</b>		
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan</li> </ul>
<b>Misi 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan</b>		
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya kerusakan lingkungan</li> </ul>
10. Menurunnya risiko bencana	Penurunan indeks risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana</li> </ul>

## 2.2 INDIKATOR KINERJA

Sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dalam menjawab isu strategis Indikator kinerja utama yang digunakan adalah,

- Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya

### **Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial**

Angka ini diperoleh dari 3 variabel yang mengukur keadaan ketenteraman dan ketertiban umum. Yaitu, prosentase penanganan penyakit masyarakat, penanganan kriminal dan penanganan pelanggaran K3 yang mencerminkan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya, Sumber data: Data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Penanggung jawab: Satpol PP Kab. Pati.

- Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan.

### **IPM (Indeks Pembangunan Manusia)**

Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia

#### **a. IPG (Indeks Pembangunan Gender)**

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

#### **b. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

- Penurunan tingkat kemiskinan

#### **a. Tingkat Kemiskinan**

Persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.

#### **b. Indeks Gini**

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

**c. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Perkapita**

Nilai PDB (Produk Domestik Bruto) atau PDRB atas dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu, PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau persatu orang penduduk.

PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

**Indeks Reformasi Birokrasi**

Indek reformasi birokrasi , Menunjukkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 8 area perubahan, adalah angka yang dihasilkan oleh PMPRB, Permenpan No 14 tahun 2014. Semakin tinggi angka PMPRB berarti reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik.

- Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah

**Nilai PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan) (=000.000)**

Digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

- Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

**a. Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi**

Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa

**b. Inflasi daerah**

IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

IHK = Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

- Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah

**Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar Pelayanan**

Mengambarkan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan dalam yang di tentukan oleh kementerian Pekerjaan Umum.



- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

#### **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai kualitas lingkungan dari suatu kota/kabupaten yang terdiri dari kualitas air, udara dan lahan.

- Menurunnya risiko bencana

#### **Penurunan Indeks Resiko Bencana**

Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan *magnitude* dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

### **2.3 PERJANJIAN KINERJA**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati 2020 mengalami proses pembahasan dalam menentukan APBD Kabupaten Pati 2020 yang memuat program dan kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Pati akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2020 ( lampiran I ), Pemerintah Kabupaten Pati berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 Kabupaten Pati. Ada target dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan lebih optimis dari Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yang memiliki *focus stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama .

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pati yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Tabel berikut memberikan gambaran program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati di tahun 2020 sesuai dengan APBD Kabupaten Pati untuk mendukung tercapainya sasaran sesuai dengan target-target indikatornya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Pati tahun 2020:

**Tabel 2.2**  
**MATRIK PROGRAM KEGIATAN DENGAN**  
**PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PATI 2020**

<b>TUJUAN DAN INDIKATORNYA</b>	<b>PROGRAM</b>
1. <b>Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya</b>	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Program pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program Pengembangan Nilai Budaya

TUJUAN DAN INDIKATORNYA		PROGRAM								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i></td> <td>63,13</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2020	<i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	63,13		4. Program Penguatan Pendidikan Karakter Siswa 5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
Indikator Utama	Target 2020									
<i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	63,13									
<b>2. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>IPM</i></td> <td>71,41</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2020	<i>IPM</i>	71,41	7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 11. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 12. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo" 15. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen" 16. Program Keluarga Berencana 17. Program peningkatan peran serta kepemudaan 18. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 19. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesra 20. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang ekonomi 21. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
Indikator Utama	Target 2020									
<i>IPM</i>	71,41									
<b>3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i></td> <td>92,07</td> </tr> <tr> <td><i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i></td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2020	<i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	92,07	<i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	69	23. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 24. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		
Indikator Utama	Target 2020									
<i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	92,07									
<i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	69									
<b>4. Penurunan tingkat kemiskinan</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Tingkat kemiskinan</i></td> <td>9,18</td> </tr> <tr> <td><i>Indeks Gini</i></td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td><i>PDRB Perkapita</i></td> <td>35.730.568</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2020	<i>Tingkat kemiskinan</i>	9,18	<i>Indeks Gini</i>	0,31	<i>PDRB Perkapita</i>	35.730.568	25. Program Lingkungan Sehat Perumahan 26. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 27. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 28. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 29. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 30. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 31. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Indikator Utama	Target 2020									
<i>Tingkat kemiskinan</i>	9,18									
<i>Indeks Gini</i>	0,31									
<i>PDRB Perkapita</i>	35.730.568									
<b>5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Indek Reformasi birokrasi</i></td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2020	<i>Indek Reformasi birokrasi</i>	64	32. Program perencanaan pembangunan daerah 33. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 34. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 35. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 36. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi dan SDM Pemerintah daerah 37. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang Tata pemerintahan 38. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 40. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 41. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang/jasa				
Indikator Utama	Target 2020									
<i>Indek Reformasi birokrasi</i>	64									
<b>6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i></td> <td>32.097.152,01</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2020	<i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	32.097.152,01	42. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 43. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 44. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 45. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda				
Indikator Utama	Target 2020									
<i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	32.097.152,01									
<b>7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2020			46. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 47. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 48. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 49. Program perlindungan konsumen dan pengamanan				
Indikator Utama	Target 2020									

TUJUAN DAN INDIKATORNYA		PROGRAM			
<i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,47	perdagangan 50. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 51. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 52. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 53. Program penataan struktur industri 54. Program pengembangan industri kecil dan menengah 55. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 56. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 57. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 58. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 59. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 60. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 61. Program pengembangan budidaya perikanan 62. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 63. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 64. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 65. Program pengembangan perikanan tangkap 66. Program pengembangan pemasaran pariwisata 67. Program pengembangan destinasi pariwisata 68. Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
<i>Inflasi Daerah</i>	3,5				
<b>8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah</b>		69. Program pembangunan jalan dan jembatan 70. Program Peningkatan Jalan & Jembatan 71. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 72. Program pembangunan turap/talud/bronjong 73. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 74. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 75. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 76. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 77. Program koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i></td> <td>74,32</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama		Target 2020	<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	74,32
Indikator Utama	Target 2020				
<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	74,32				
<b>9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>		78. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 79. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 80. Program peningkatan pengendalian polusi 81. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i></td> <td>58,35</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama		Target 2020	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	58,35
Indikator Utama	Target 2020				
<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	58,35				
<b>10. Menurunnya risiko bencana</b>		82. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i></td> <td>154</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama		Target 2020	<i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	154
Indikator Utama	Target 2020				
<i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	154				

## 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2020, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, jumlah anggaran belanja Kabupaten Pati Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp2.900.220.672.000,00 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.858.943.528.000,00 (atau 43,99 persen dari total anggaran Belanja) dan Belanja Langsung sebesar Rp1.041.277.144.000 (atau 56,01 persen dari total anggaran Belanja).

**Tabel 2.3**  
**Target Belanja Daerah**

Uraian	Target (Rp)	%
Belanja Tidak langsung	1.858.943.528.000,00	43,99
Belanja Langsung	1.041.277.144.000	56,01
<b>Total belanja</b>	<b>2.900.220.672.000,00</b>	<b>100</b>

Sumber: APBD Kab. Pati, 2020

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang utama pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dan program-program pendukung, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp590.528.518.275,00 atau sebesar 76,33 persen dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp450.748.625.725,00 atau 23,67 persen dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, tujuan pembangunan dengan anggaran paling besar adalah Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan dengan besaran anggaran 57,50 persen dari total belanja utama. Tujuan lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah sebesar 25,04 persen dari total anggaran belanja utama. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif sedikit adalah sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia hanya sebesar 0,03 persen dan anggaran untuk menurunkannya risiko bencana hanya sebesar 0,13 persen dari total anggaran belanja langsung utama yang berkaitan langsung dengan indikator kinerja.

**Tabel 2.4**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan**  
**Tahun Anggaran 2020**

TUJUAN SASARAN TRATEGIS	ANGGARAN	%
1) Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	4.753.565.000	0,80
2) Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	339.561.924.650	57,50
3) Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	200.186.900	0,03
4) Penurunan tingkat kemiskinan	13.539.747.250	2,29
5) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	46.101.830.575	7,81
6) Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	3.237.691.500	0,55
7) Mekuatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	33.167.655.950	5,62
8) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	147.869.305.100	25,04
9) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.309.406.000	0,22
10) Menurunnya risiko bencana	787.205.350	0,13
<b>Total</b>	<b>590.528.518.275</b>	<b>100,00</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**G**ood governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prinsip dasar dalam terselenggaranya *good governance* dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Jadi, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana anggaran dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah anggaran tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Untuk menyajikan informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah diperlukan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja atau juga disebut *performance* dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi/instansi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan pengukuran pada indikator-indikator sesuai sasaran yang dituju, didasarkan pada target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK), untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2020. Adapun hasil pengukuran target dengan realisasi untuk masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.2  
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAP KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
1	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	1. <i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	63,13	93,75	148,50	SANGAT TINGGI
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	2. <i>IPM</i>	71,41	71,77	100,50	SANGAT TINGGI
3	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	3. <i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	92,07	91,60	99,49	SANGAT TINGGI
		4. <i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	69	69,99	101,43	SANGAT TINGGI
4	Penurunan tingkat kemiskinan	5. <i>Tingkat kemiskinan</i>	9,18	10,08	90,20	TINGGI
		6. <i>Indeks Gini</i>	0,31	0,31	100	SANGAT TINGGI
		7. <i>PDRB Perkapita</i>	35.730.568	34.180.000	95,66	SANGAT TINGGI
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	8. <i>Indek Reformasi birokrasi</i>	64	66,63	104,11	SANGAT TINGGI
6	Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	9. <i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	32.097.152,01	30.902.899	96,28	SANGAT TINGGI
7	Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	10. <i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,47	5,86	107,13	SANGAT TINGGI
		11. <i>Inflasi Daerah</i>	3,5	2,51	128,29	SANGAT TINGGI
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	12. <i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	74,32	83,53	112,39	SANGAT TINGGI
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. <i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	58,35	53,88	92,34	SANGAT TINGGI
10	Menurunnya risiko bencana	14. <i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	154	94,27	138,79	SANGAT TINGGI

Dari 14 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 13 Indikator Kinerja Daerah telah memenuhi kriteria **sangat tinggi (91-100%)**, sedangkan indikator kinerja tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan angka capaian dan hanya mencapai kriteria tinggi (90,20), ini merupakan dampak dari pandemi Covid 19 yang terjadi hampir diseluruh dunia.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1 Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya.

Pemerintah Kabupaten Pati berupaya mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial dan melestarikan nilai unggul budaya. Keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Prosentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial.

**Tabel.3.3**  
Capaian Kinerja Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	63,13	93,75	148,50

*Sumber : Satpol PP, Tahun 2020*

#### Uraian Kinerja

Prosentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial. Angka ini diperoleh dari tiga variabel yang mengukur keadaan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu penanganan penyakit masyarakat, penanganan kriminalitas dan penanganan pelanggaran K3.

Penyakit masyarakat tertangani sepanjang tahun 2020 adalah 64 kasus dari 70 kasus yang ditemukan atau sebesar 91,43 persen. Penanganan kriminalitas 92 persen, dimana dari 75 kasus dilaporkan sebanyak 69 kasus selesai ditangani pada tahun 2020. Persentase Penanganan Pelanggaran K3 berupa penertiban PGOT, pengamanan unjuk rasa, obyek vital dan sampah di wilayah Kabupaten Pati pada tahun 2020 sebesar 98 persen atau sebanyak 450 kasus K3 telah berhasil tertangani dari total 460 kasus yang ditemukan.

#### Evaluasi dan Analisa Kinerja

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Data Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial

INDIKATOR	DATA 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	TARGET 2022
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	73,99	76,54	93,75	75

*Sumber : Satpol PP, Tahun 2020*

Target Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial pada tahun 2020 adalah sebesar 63,13 persen dan terealisasi sebesar 93,75 persen yang berarti target indikator pada akhir masa RPJMD sebesar 75 persen telah terlampaui pada tahun 2020. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 148,50 persen.

Sebagai upaya mencapai target indikator yang telah diperjanjikan dilaksanakan program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang didukung dengan kegiatan penegakan produk hukum daerah. Operasi Penegakan Perda ini dilaksanakan lima kali dalam sebulan pada lima Eks Kawedanan yaitu Jakenan, Juwana, Kayen, Pati dan Tayu. Dalam hal penanganan penyakit masyarakat oleh Satpol PP ditangani bidang Penegakan Produk Hukum Daerah bekerja sama dengan Kepolisian, TNI dan Dinas terkait. Penanganan Penyakit masyarakat yang dilaksanakan yaitu operasi karaoke, kost-kost an, salon, minuman keras, dan anak-anak sekolah yang bolos di jam – jam sekolah.

Prosentase penanganan pelanggaran K3 didukung program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dimana di dukung kegiatan penyiapan tenaga pengendali kemandirian dan kenyamanan lingkungan, kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat serta kegiatan peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini, Satpol PP berpedoman pada peraturan daerah kabupaten Pati nomor 7 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam pelaksanaannya Satpol PP mempunyai tiga regu patroli yang beroperasi pagi, siang, dan malam. Dalam hal penanganan pelanggaran K3 oleh Satpol PP ditangani bidang Tibumtranmas, dalam hal penanganan pelanggaran K3, Satpol PP bekerja sama dengan Kepolisian, TNI dan Dinas terkait.

Untuk menunjangnya dilaksanakan 6 program sebagai berikut; Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Penguatan Pendidikan Karakter Siswa, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan anggaran total Rp4.753.565.000,00 atau 0,80 persen dari anggaran langsung yang prioritas.

Dengan capaian kinerja 148,50 persen penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya dinilai efisien karena dari anggaran setelah perubahan Rp2.816.395.000,00 terealisasi Rp2.715.331.925,00 atau terserap 96,41 persen efisiensi sebesar 3,59 persen.

### **3.2.2 Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan**

Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan , sasaran yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati tercermin pada capaian Indikator “Indeks Pembangunan Manusia”. IPM dapat menggambarkan progres perkembangan pembangunan manusia secara umum di



suatu wilayah, bagaimana capaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonominya.

**Tabel.3.5**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Dan**  
**Kualitas Serta Pemerataan Akses Pendidikan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	71,41	71,77	100,50

*Sumber : BPS Kabupaten Pati Tahun 2020*

### Uraian Kinerja

Pada tahun 2020 target IPM Kabupaten Pati adalah 71,41 sampai dengan akhir tahun 2020 realisasinya sebesar 71,77 yang berarti capaian kinerjanya adalah 100,50 persen, masuk dalam kriteria sangat tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang dihitung dari pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2020 Angka harapan hidup Kabupaten Pati sebesar 75,93 turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,95. Sementara itu untuk komponen pengetahuan, penduduk Kabupaten Pati yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2020 rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,44 tahun. Di lain pihak, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah diperkirakan bisa mengenyam pendidikan hingga 12,65 tahun atau setara dengan tamat SMA. Standar hidup layak yang dihitung dari pengeluaran per kapita pada tahun 2020 telah mencapai Rp10.390.000,- per kapita per tahun atau turun sebesar Rp270.000,- dari tahun 2019 sebesar Rp10.660.000,- perkapita per tahun (sumber: BPS tahun 2020).

### Evaluasi dan Analisa Kinerja

Angka IPM Kabupaten Pati cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Angka IPM pada tahun 2018 sebesar 70,71 meningkat sebesar 0,64 persen menjadi 71,35 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 71,77 atau meningkat sebesar 0,42 persen dari tahun 2019. Apabila dilihat dari indikator-indikator penyusunnya, dari tahun ke tahun juga menunjukkan kecenderungan meningkat.

Pada tahun 2020, bila dibandingkan 5 kabupaten sekitar, angka IPM Kabupaten Kudus merupakan angka tertinggi yaitu 75,00 IPM Kabupaten Pati sebesar 71,77, sedangkan Kabupaten Blora memiliki IPM terendah dengan angka 68,84. Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2017-2022 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Data IPM**

INDIKATOR	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	TARGET 2022
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,71	71,35	71,77	73,00

*Sumber data : BPS Kabupaten Pati Tahun 2020*

Bila pembangunan terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi berjalan dengan baik, setidaknya sama dengan tahun-tahun yang telah berjalan, mengacu kepada rerata kenaikan IPM Kabupaten Pati, maka target akhir RPJMD dapat dicapai pada akhir tahun RPJMD.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2020 kinerja ini didukung oleh pelaksanaan program-program sebagai berikut; Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas, Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo", Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen", Program Keluarga Berencana, Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesra, Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang ekonomi, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, semuanya ada 16 program dengan anggaran Rp339.561.924.650,00 atau 57,50% dari belanja prioritas.

Capaian kinerja meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, sangat tinggi yaitu 100,50 persen. Pemerintah menganggarkan setelah perubahan Rp254.173.757.800,00 terealisasi Rp238.772.259.085,00 atau dengan serapan anggaran 93,94 persen. Hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 6,06 persen.

### 3.2.3 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia.

Upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia ini dilakukan untuk menjamin keadilan pembangunan pada masing-masing gender.

**Tabel.3.7**  
Capaian Kinerja Meningkatnya Keadilan Dan Kesetaraan Gender,  
Untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
IPG (Indeks pembangunan Gender)	92,07	91,60	99,43
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	69,00	69,99**	101,43

\*\* Data Proyeksi

#### **Uraian Kinerja**

Keberhasilan tujuan diukur dengan dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2020 target IPG adalah 92,07 dan realisasi 91,60 artinya capaian kinerjanya sebesar 99,43 persen. Hal Ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Untuk IDG dari target 69,00 pada tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pati adalah 69,99 atau 101,43 persen.

Indeks pembangunan gender (IPG) mencerminkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, komponen IPG sama dengan komponen IPM namun dipilah antara laki-laki dan perempuan.

### Evaluasi dan Analisa kinerja

Sementara capaian IPG Kabupaten Pati di tahun 2020 masih tetap 91,60 sama dengan capaian ditahun 2019, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan 10 poin dari tahun 2018 yaitu sebesar 91,6. Sedangkan IDG Kabupaten Pati pada tahun 2020 naik menjadi 69,99 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 IDG naik 75 poin dari tahun 2018 menjadi sebesar 67,30. Capaian masing-masing indikator juga memperlihatkan tren kenaikan pada lima tahun terakhir, yang memberikan keyakinan bahwa target IPG dan IDG pada akhir periode RPJMD 2017-2022 yaitu sebesar 93,00 dan 70,00 akan tercapai, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan realisasi Indikator Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia**

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,71*	91,98	91,50	91,60	91,60*
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,20*	67,96	66,55	67,30**	69,99

\* data proyeksi \*\* data sementara

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi tren peningkatan nilai IPG, walaupun capaian tahun 2018 lebih rendah 48 poin dibanding capaian tahun 2017, namun capaian tahun 2019 berhasil meningkat 10 poin dibanding tahun 2018, sedangkan ditahun 2020 capaian masih tetap 91,60. Analisis terhadap masing-masing komponen IPG dilakukan untuk melihat kontribusi tiap komponen terhadap IPG. Rasio Angka Harapan Hidup Kabupaten Pati antara perempuan dan laki-laki di tahun 2020 sebesar 1,043. Hal tersebut menunjukkan derajat kesehatan perempuan di Kabupaten Pati lebih tinggi dibandingkan derajat kesehatan laki-laki. Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan terhadap laki-laki Kabupaten Pati Tahun 2020 sebesar 0,40, sementara itu rasio rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan terhadap laki-laki Kabupaten Pati sebesar 0,86. Rasio HLS dan RLS perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Pati tersebut menunjukkan tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa derajat ekonomi laki-laki di Kabupaten Pati lebih tinggi dibandingkan derajat ekonomi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan terutama di bidang ekonomi dan pendidikan belum berhasil memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam lima tahun terakhir IDG Kabupaten Pati juga menunjukkan tren peningkatan walaupun capaian tahunannya masih fluktuatif dan masih berada di bawah capaian nasional. Komponen yang berperan dalam peningkatan nilai IDG yaitu persentase perempuan sebagai tenaga profesional yang mengalami peningkatan, diindikasikan dengan peningkatan persentase PNS perempuan ditahun 2020 sebesar

54,71% dibandingkan 53,66% di tahun 2019, meskipun proporsi di level manajerial lebih sedikit dibandingkan pria. Sementara itu, komponen partisipasi perempuan di lembaga perwakilan rakyat masih di bawah 20 persen yaitu baru ada delapan orang anggota DPRD perempuan dari 50 anggota DPRD yang ada. Komponen lain yang nilainya relatif rendah adalah sumbangan pendapatan perempuan. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dengan perempuan dipengaruhi oleh persentase pekerja laki-laki lebih besar dibanding pekerja perempuan dan tingkat pendidikan pekerja laki-laki lebih tinggi dibanding pekerja perempuan.

Tujuan ini didukung oleh 2 program yaitu Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang dianggarkan sebesar Rp200.186.900,00 atau 0,03 persen dari belanja langsung yang mendukung program prioritas.

Sedangkan realisasi anggaran yang telah digunakan sebesar Rp110.715.500,00 atau 67,43 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp164.200.000,00.

### 3.2.4 Penurunan tingkat kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kondisi miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan atau karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan kelompok marginal mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kebijakan pembangunan ekonomi, sehingga tingkat efektivitas kebijakan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan yaitu, Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini dan PDRB Perkapita.

**Tabel 3.9**  
Capaian Kinerja Penurunan Tingkat Kemiskinan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Kemiskinan	9,18	10,08	90,20
Indeks Gini	0,31	0,31*	100,00
PDRB Perkapita	35.730.568	34.180.000*	95,66

\*angka asumsi    \*\* angka proyeksi

### ***Uraian Kinerja***

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pati pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada angka 10,08, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid 19, dan kenaikan tingkat kemiskinan tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati tapi juga terjadi di daerah kabupaten lain, secara jumlah keseluruhan penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama ditahun lalu. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 tingkat kemiskinan turun sebesar 9,46% (118.980 jiwa) atau turun sebanyak 4.960 orang dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 9,90%. Dari perspektif Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Keparahan Kemiskinan (P2), yang mengindikasikan jarak antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin serta kesenjangan antar kelompok masyarakat miskin, keduanya menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Tahun 2020 sebesar 1,37 atau turun 10 poin dibandingkan Tahun 2019, dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi sebesar 0,26 atau turun 5 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pati Tahun 2020, sebagaimana Tabel 3.9 adalah sebesar 90,20 % dikarenakan adanya pandemi covid 19. Pandemi Covid-19 yang terjadi di akhir tahun 2019 dan mulai terdeteksi di Kabupaten Pati pada awal April 2020 berdampak terhadap kualitas hidup penduduk, diantaranya pada aspek ekonomi. Beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan yang berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan pada beberapa perusahaan serta penurunan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam sektor informal. Selain itu, terjadi peningkatan pengeluaran yang ditanggung untuk kebutuhan sehari-hari (bahan makan dan kebutuhan pulsa/paket data) yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat di tahun 2020 sehingga menyebabkan belum tercapainya target pembangunan (sumber: BPS Kabupaten Pati 2020; Profil Masyarakat Kabupaten Pati di Era *New Normal*).

Indeks Gini (IG) yang merupakan indikator ketimpangan pendapatan masyarakat, pada Tahun 2020 diasumsikan sama dengan realisasi pada 2017, 2018 dan 2019 yaitu sebesar 0,31. Menurut Michael P. Todaro dalam bukunya berjudul *Economic Development in Third World* (Pembangunan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang), Indeks Gini Kabupaten Pati masuk kategori pendapatan yang relatif merata atau relatif sama ketimpangan distribusi pendapatan, karena berada pada kisaran angka 0,2 – 0,35.

PDRB Perkapita masyarakat Kabupaten Pati Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp34.180.000,00 Hal ini didasarkan pada kondisi perekonomian tahun sebelumnya yang mampu tumbuh cukup signifikan dan kondisi pada Tahun 2020 diprediksikan memiliki pola pertumbuhan yang serupa dengan Tahun 2019. Dengan mengacu pada angka ketimpangan distribusi pendapatan (IG) sebesar 0,31 mengindikasikan bahwa semakin besar angka PDRB Perkapita, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat secara lebih merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 realisasi mencapai angka sebesar 4,74 persen. Peningkatan pengangguran terjadi sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di akhir 2019. Keberadaan pandemi tersebut terbukti menurunkan kinerja sektor industri yang selanjutnya menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) buruh oleh perusahaan yang terdampak. Berdasarkan data

dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, hingga Bulan Mei 2020, terdapat 23 pekerja yang di PHK dan 114 pekerja yang dirumahkan. Namun demikian, jumlah sebenarnya kemungkinan lebih besar mengingat tidak semua perusahaan yang melakukan PHK melaporkan hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, potensi peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Pati juga dapat berasal dari para pekerja yang bekerja di luar daerah, luar pulau, ataupun luar negeri yang kembali ke daerah karena ketiadaan pekerjaan sebagai dampak langsung dari pandemi covid 19.

### **Evaluasi dan Analisa Kinerja**

**Tabel 3.10**  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini dan PDRB Perkapita Tahun 2016-2020

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan	11,65	11,38	9,90	9,46	10,08
Indeks Gini	0,31	0,31*	0,31*	0,31*	0,31*
PDRB Perkapita (Rp. Juta)	27,28	29,36	31.81	34,31**	34,18

\* angka asumsi \*\* angka proyeksi

Angka kemiskinan di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2016–2020 cenderung menurun, dimana penurunan terbesar terjadi pada Tahun 2018 yaitu turun 148 basis poin atau menjadi sebesar 9,90 persen (mencapai single digit) dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian ditahun 2020 terjadi kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,62 persen dari tahun 2019, yang disebabkan oleh pandemi covid 19. Mengacu pada target kinerja penurunan tingkat kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 yang menargetkan angka kemiskinan menjadi 9,51 persen pada akhir periode, maka capaian angka kemiskinan pada tahun 2020 sementara belum mencapai target RPJMD Tahun 2022. Pandemi covid 19 merupakan permasalahan berat yang harus dihadapi, sehingga Pemerintah Kabupaten Pati harus melakukan langkah-langkah strategis berupa kebijakan yang efektif untuk terus menekan angka kemiskinan ke depan melalui peningkatan koordinasi kebijakan bidang kesra, peningkatan koordinasi kebijakan bidang ekonomi serta peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan secara lebih terpadu dan komprehensif. Dampak dari kebijakan ini diharapkan memiliki tingkat efektivitas yang signifikan dalam pemerataan distribusi dan peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka pengangguran serta pengurangan angka kemiskinan.

Untuk menurunkan angka kemiskinan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pati, telah melaksanakan 7 program yaitu; Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp13.539.747.250 atau 2,29 persen dari seluruh anggaran prioritas dan terserap hingga Rp7.852.791.634.189,00 atau 96,69 persen dari anggaran setelah

perubahan sebesar Rp8.121.633.950,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 3,31 persen.

### 3.2.5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Tahun 2020 adalah tahun kedua Kabupaten Pati di evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasinya oleh Kementerian PAN dan RB, setelah sebelumnya melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian Mandiri tersebut mengukur delapan area perubahan dengan delapan indikator proses (faktor pengungkit) dan tiga indikator hasil. Sampai dengan masa pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum diumumkan maka Indikator diukur dengan skor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020.

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja**

#### **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	64	66,63	104,11

*Sumber data : PMPRB Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020*

#### **Uraian kinerja:**

Dalam area manajemen perubahan, Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk dengan diterbitkannya SK Bupati No. 891/745 Tahun 2019 untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pati tahun 2016-2020. Selama tahun 2020 dalam rangka penataan dan harmonisasi peraturan perundangan telah ditetapkan 7 Peraturan Daerah dan 143 Peraturan Bupati.

Penguatan organisasi dilaksanakan dengan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi, mengevaluasi dan menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain serta mengevaluasi dan menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Telah dilakukan pengembangan *e-government* di lingkungan internal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung proses birokrasi namun belum terintegrasi. Indeks SPBE 2019 adalah 3,22.

Rekrutmen CPNS dan pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka. Terdapat sistem informasi kepegawaian yaitu SIMPEG BKPP, yang dapat diakses oleh pegawai melalui operator di masing-masing perangkat daerah.

Dalam implementasi manajemen kinerja, pada tahun 2019 Kabupaten Pati memperoleh predikat B dengan Nilai SAKIP 63,26, sementara sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020, nilai SAKIP belum turun.

Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan.

Seluruh rekomendasi APIP yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada *client* dan audit berbasis risiko. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang telah dilaksanakan beberapa unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan telah dilakukan perhitungan dengan didapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 3,40. Nilai tersebut termasuk dalam kategori BAIK. Begitu juga jika dilihat dari nilai rata-rata IKM tertimbang dikalikan nilai konversi (25) hasilnya adalah sebesar 84,98. Nilai rata-rata IKM tertimbang dan nilai konversi IKM tersebut termasuk dalam kategori mutu pelayanan B dan termasuk dalam kategori Baik. Artinya bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik.

Capaian indeks Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,87 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaian indeksnya sebesar 83,11. Kenaikan indeks tersebut merupakan suatu kewajaran terhadap tingkat kepuasan terhadap pelayanan. Rendahnya capaian nilai unsur sarana prasarana dan waktu pelayanan merupakan kewajaran terhadap tingkat kepuasan public]. Kemunculan pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan guncangan kondisi (*condition shock*) sehingga mempengaruhi siklus keseimbangan dan tatanan kehidupan.

Wabah yang akhirnya menjadi pandemi internasional telah banyak merubah pola hidup, sistem hidup dan kehidupan manusia, termasuk mengguncang sistem pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Situasi pandemi yang memberi dampak begitu dalam terhadap penghidupan sosial dan ekonomi masyarakat tentu berpengaruh dan sangat wajar terhadap persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menekan penyebaran Covid-19. Terdapat kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang diterbitkan selain untuk menekan penyebaran COVID-19 juga untuk tetap semangat meningkatkan kualitas pelayanan demi kepentingan bersama. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, *Work From Home* (WFH), pelayanan berbasis *online*, kebijakan *rapid test* sebagai persyaratan mobilisasi masyarakat, maupun pelayanan publik pada era *new normal* dengan menerapkan protokol kesehatan. Semuanya dilakukan agar pelayanan publik terus hidup dan berjalan.

Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung. Kondisi demikian, wajar jika masyarakat belum terbiasa dan belum beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebijakan pemberian layanan yang berbeda seperti biasanya. Guna memperkuat layanan di masa pandemi, para penyelenggara pelayanan publik terus berupaya mensosialisasikan informasi dan



penyediaan layanan secara *online*. Meskipun berpengaruh terhadap tingkat kecepatan waktu layanan, namun di sisi lain Pemerintah Kabupaten Pati telah berupaya mendukung penekanan tingkat penyebaran COVID-19.

Adapun yang terkait dengan inovasi pelayanan di beberapa unit layanan/Perangkat Daerah juga semakin meningkat. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan mampu melakukan terobosan layanan yang baik, efektif dan efisien. Bahkan inovasi layanan yang diimplementasikan tersebut telah tercatat sebagai 10 (sepuluh) inovasi pelayanan terbaik tingkat provinsi Jawa Tengah, yaitu SIM ULP Kabupaten Pati TOP pada tahun 2018 dan *Cluwak Pregnancy Tool* pada tahun 2019, sementara ditahun 2020 Kabupaten Pati masuk dalam TOP 99 di tingkat nasional.

### **Evaluasi dan Analisa Kinerja**

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Data Indikator**  
**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	65,2	69,15	70,74	66,63	65

*Sumber : PMPRB Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020*

Dari tahun ke tahun skor PMPRB Kabupaten Pati meningkat dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Hasil Evaluasi PMPRB tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pati ada pada angka 66,63, hal ini menunjukkan adanya penurunan, dikarenakan adanya penambahan aspek dan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian baik pada komponen pengungkit maupun hasil yang pada tahun sebelumnya belum ada dan hanya memakai aspek pemenuhan saja, sementara ditahun 2020 penilaian harus memenuhi tiga aspek yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara dan aspek reform. Kabupaten Pati menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi pada akhir masa RPJMD sebesar 65, dalam arti meskipun mengalami penurunan target masih bisa tercapai. Melihat laju angka skor PMPRB meskipun penilaian masih dilakukan secara mandiri, diyakini pada akhir masa RPJMD target dapat dicapai.

Untuk meingkatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat Kabupaten Pati memiliki Mal Pelayanan Publik yang dapat memberikan kemudahan dalam mengurus berbagai jenis layanan publik baik yang terkait dengan perizinan, non-perizinan, maupun administrasi kependudukan masyarakat dari berbagai instansi dalam satu tempat. Hadir sebagai MPP ke - 33 di Indonesia, Mal Pelayananana Publik (MPP) Kabupaten Pati berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menyatukan 305 layanan perizinan dalam 22 gerai yang terdiri dari 13 perangkat daerah dan 9 instansi vertikal.

Mal Pelayanan Publik (MPP) diresmikan pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dengan disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Pati Haryanto. Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik ini adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Adapun perangkat daerah yang bergabung memberikan layanan di MPP Kabupaten Pati antara lain: Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informasi (Teras Aduan), serta Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, ada beberapa instansi vertikal dan BUMD yang tergabung memerikan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati antara lain: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, Kantor Imigrasi Kelas II Pati, Polres Pati, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Kantor Pos Pati, dan Bank Jateng Cabang Koordinator Pati.

Sampai dengan 16 Januari 2021 sudah terdapat 2.467 pemohon yang memanfaatkan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati. Hal ini membuktikan manfaat dan efektifitas dari Mal Pelayanan Publik bagi masyarakat. Untuk menunjang berbagai pelayanan yang ada serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna layanan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati menyediakan sarana dan prasarana pendukung, antara lain: Anjungan Disdukcapil Mandiri, ruang laktasi, layanan fotokopi, kafetaria, pojok baca, arena bermain anak, ruang ibadah, dan sarana prasarana lainnya.

*Gambar 3.1*  
*Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati*



Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung anggaran sebesar Rp46.101.830.575,00 digunakan untuk mencapai tujuan daerah tahun 2020 dengan menjalankan : Program perencanaan pembangunan daerah, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program koordinasi

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi dan SDM Pemerintah daerah, Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang Tata pemerintahan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program pembinaan dan pengembangan Aparatur, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang/jasa, seluruhnya menggunakan 7,81 persen dari total belanja untuk pembiayaan program prioritas.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah mengalokasikan Rp26.591.894.225,00 dalam perubahan, yang terserap Rp25.081.516.929,00 dengan capaian kinerja mencapai 104,11 persen. Penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien, karena dengan 94,32 persen anggaran telah dapat mendukung tercapainya target, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar 5,68 persen.

### 3.2.6 Peningkatan Kesempatan Kerja Lokal Dan Produktifitas Daerah

Tingkat kesempatan kerja dan produktivitas daerah adalah dua hal yang sangat berkaitan karena untuk mengetahui tingkat produktivitas daerah, dengan mengacu pada data dasar tahunan yang tersedia dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah, diperlukan data ketenagakerjaan (Sakernas) sebagai variabel input serta data PDRB sebagai variabel output.

#### *Uraian Kinerja*

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan indikator yang berlawanan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 79,46%. Sedangkan produktivitas daerah merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar output (rupiah) yang dihasilkan atas penggunaan faktor produksi input (orang/penduduk yang bekerja) dalam suatu perekonomian. Untuk menghitung produktivitas daerah dibutuhkan informasi data Produk Domestik Regional bruto (PDRB), dalam hal ini PDRB atas dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan data penduduk usia kerja yang bekerja (jumlah angkatan kerja dikurangi jumlah pengangguran terbuka).

#### *Evaluasi dan Analisa Kinerja*

**Tabel 3.13**  
**Capaian Kinerja Peningkatan Kesempatan Kerja Lokal dan Produktifitas Daerah**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai PDRB ADHK (Rp. Juta)	32.097.152,01	30.902.899.000*	96,28

\*Angka asumsi

PDRB menurut Lapangan Usaha ADRB Kabupaten Pati pada tahun 2020 sebesar Rp30.902.899.000,00. Angka tersebut lebih tinggi dari Rp30.901.000.000,00 pada tahun 2019 dan mencapai 96,28% dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Sedangkan produktivitas daerah diharapkan mencapai Rp48.700.000,00 atau melebihi tahun 2019 yang sebesar Rp47.960.000,00.

Upaya meningkatkan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah program-program yang dilaksanakan Kabupaten Pati adalah Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. Pada tahun 2020 dana yang diserap Rp1.546.144.231,00 yang berarti 88,34 persen dari yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp1.546.144.231,00 menunjukkan bahwa terjadi efisiensi anggaran sebesar 11,66 persen.

### 3.2.7 Menkuatnya Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah

Dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi Meningkatkan produktivitas dan inovasi di bidang/sector pertanian, perdagangan dan industri, meningkatnya investasi daerah, daya saing daerah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah

**Tabel 3.14**

**Capaian Kinerja Menkuatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi	5,47	5,86*	107,13
Inflasi Daerah	3,50	2,51	128,29

*\*) angka asumsi*

#### **Uraian Kinerja**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tahun 2020 sebesar 5,86 dengan capaian kinerja 107,13 persen, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,85 persen. Sedangkan Inflasi Daerah Kabupaten Pati tahun 2020 sebesar 2,51, tercapai 128,29 persen.

Angka inflasi Kabupaten Pati selalu dibawah angka inflasi pusat maupun Provinsi Jawa Tengah. Capaian inflasi Kabupaten Pati dari 2017-2020 selalu dibawah target inflasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022 (kisaran 3,00%-5,00%), yang berarti bahwa harga-harga yang berlaku di Kabupaten Pati dalam kurun waktu ini cenderung stabil/terkendali dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

#### **Evaluasi dan Analisa Kinerja**

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan indikator makro daerah yang menjadi pilar utama daya saing daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan indikator lainnya seperti pengangguran, kemiskinan, pembangunan manusia, serta ketimpangan distribusi pendapatan, apakah pertumbuhan tersebut berkualitas atau sebaliknya. Hal ini yang sering disebut dengan istilah Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Dukungan stabilitas harga (inflasi) juga sangat menentukan kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan juga daya saing daerah.

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan data pertahun**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	TARGET 2022
<b>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</b>	5,74	5,85*	5,86*	5,60
<b>Inflasi Daerah</b>	2,77	2,51	2,51*	3,00

\*) angka asumsi

Kabupaten Pati yang secara geografis berada pada jalur utama lalu lintas perdagangan paling padat di pantai utara bagian timur Pulau Jawa dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu sebesar 5,74 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,85 persen pada tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 5,86 persen pada tahun 2020. Realisasi pertumbuhan pada tahun 2020 ini telah mencapai target 2020 di RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 yaitu sebesar 5,86 persen, bahkan capaian tersebut sudah masuk pada kisaran target pertumbuhan ekonomi pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 5,6 - 6,0 persen pada tahun 2022.

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun selanjutnya diharapkan dapat menembus angka lebih dari 5,86 persen. Target tersebut bisa tercapai dengan prasyarat bahwa sektor-sektor penopang perekonomian yang dominan seperti sektor industri manufaktur dapat tumbuh minimal sebesar 4,74 persen, sektor pertanian 3,81 persen, sektor perdagangan 6,67 persen, sektor konstruksi 6,12 persen dan sektor-sektor yang lain diasumsikan memiliki tingkat pertumbuhan yang tetap.

Tingkat inflasi di Kabupaten Pati pada kurun waktu 2018 – 2020 dalam status terkendali dan mengalami tren penurunan serta cenderung stabil dari 2,77 pada tahun 2018. Tingkat inflasi pada tahun 2019 turun menjadi 2,51 dan stabil di level 2,51 pada tahun 2020. Inflasi tahun 2020 paling dominan disebabkan oleh peningkatan harga sandang (5,50%), bahan pangan (4,62%), dan komponen penunjang lainnya yang berada pada kisaran 1,5% - 2,7%.

Terjaganya inflasi pada level yang cukup rendah dapat mendukung program pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat lapisan menengah bawah yang sangat rentan terhadap gejolak harga, utamanya gejolak/peningkatan harga yang dipicu oleh harga *volatile foods* seperti sembako dan harga kebutuhan pokok lain (kategori *non administered price*) yang sangat ditentukan oleh mekanisme pasar, serta harga komoditas/barang kategori *administered price* seperti harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif angkutan, yang sangat ditentukan atau menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme subsidi.

Selama periode 2017 – 2020 jumlah perusahaan industri pengolahan berskala besar dan sedang di Kabupaten Pati terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 jumlah industri besar dan sedang yang beroperasi di Kabupaten Pati tercatat 192 perusahaan dan meningkat menjadi 209 perusahaan pada tahun 2019. NTP Kabupaten Pati tahun 2019 sebesar 104,24.

NTP (Nilai Tukar Petani) merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Jumlah kunjungan wisata tahun 2020 sebanyak 510.361 wisatawan, turun dari tahun 2019 yang sejumlah 1.739.500 wisatawan dan merupakan dampak pandemi Covid 19 (sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata).

Pertumbuhan investasi daerah pada tahun 2020 sebesar 6,02 persen dengan total investasi sebesar Rp5.554.899.861.300,00 terdiri dari nilai investasi dalam negeri sebesar Rp5.470.899.861.300,00 dan investasi asing sebesar Rp84.000.000.000,00. Meskipun pertumbuhan investasi melampaui target, masih dapat ditingkatkan kembali dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dan pemberian insentif kepada investor.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten telah menorehkan prestasi pada Penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Penghargaan Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, masuk dalam nominasi TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk aplikasi SIIPA (Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati) pada kompetisi inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk Admin Lokal Pemerintah Kabupaten Pati pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Award Tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif (Innovative Government Award 2020) diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini merupakan hasil dari usaha/upaya serta tekad yang keras dari Pemerintah Kabupaten Pati untuk selalu meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam mewujudkan peningkatan produktivitas, kemajuan dan kemandirian daerah di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif dan keniscayaan era disrupsi ekonomi (*industry 4.0*) yang tak bisa dihindari.

Pemerintah Kabupaten Pati mengupayakan penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dengan menyelenggarakan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Program peningkatan dan pengembangan ekspor, Program peningkatan kemampuan teknologi industri, rogram penataan struktur industri, Program pengembangan industri kecil dan menengah, Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, Program pengembangan budidaya perikanan, Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, Program pengembangan perikanan tangkap, Program pengembangan pemasaran pariwisata, Program pengembangan destinasi pariwisata dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan .

Anggaran untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah sebesar Rp33.167.655.950,00 dan menjadi Rp31.495.880.725,00 setelah perubahan, dengan serapan anggaran sebesar Rp30.484.700.403,00 atau 96,79 persen, sehingga dapat diasumsikan ada efisiensi anggaran sebesar 3,21 persen. Dengan dua indikator yang pengukurannya tercapai 107,13 persen dan 128,29 persen.

### 3.2.8 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah

Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan. Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dihitung dari rerata prosentase Kapasitas air baku daerah, Daerah irigasi dalam kondisi baik, Jalan kondisi baik dan Jembatan kondisi baik. Realisasi pada tahun 2020 sebesar 82,21 persen yang berarti capaian kinerja sebesar 110,62 persen.

**Tabel 3.16**

**Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi sesuai standar pelayanan	74,32	82,21	110,62

*Sumber : DPU TR Kabupaten Pati Tahun 2020*

#### **Uraian Kinerja**

Jaringan jalan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan umum yang sangat penting, tersedianya prasarana jalan baik kualitas maupun kuantitas sangat menentukan mudah dan tidaknya suatu daerah di jangkau (tingkat aksesibilitas). Apabila aksesibilitas di suatu daerah tinggi maka perkembangan wilayah akan mengalami kelancaran. Sehingga semakin baiknya sistem jaringan jalan dalam suatu wilayah, semakin lancar pula distribusi baik barang, jasa maupun informasi lainnya yang dapat memacu perkembangan wilayah tersebut.

Sarana dan prasarana yang disuatu wilayah berupa jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, kendaraan (darat, udara, dan laut), terminal, pelabuhan, dan lain-lain memberikan landasan terhadap kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. Sarana dan prasarana transportasi akan menunjang dan mendukung pembangunan secara fisik. Dalam hal ini, untuk memudahkan pelayanan dan menghindari kemacetan perlu mengembangkan jaringan jalan dan jasa pelayanan dalam dengan melibatkan peran pemerintah setempat dan masyarakat serta dunia usaha.

Sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah membangun jalan sepanjang 837.377 kilometer jalan kabupaten. Dari total panjang jalan yang ada, di Kabupaten Pati sebesar 100 persen permukaannya sudah di aspal. Pada tahun 2020, panjang jalan yang dalam kondisi mantab sepanjang 1.076.787 km ( beraspal baik 873.163 km dan beraspal sedang 203.624 km ) dari total 1.466.237 km atau 73,44 persen, sedangkan jumlah jembatan yang baik adalah sebanyak 288

jembatan dari total 363 jembatan atau 79,34 persen. Faktor aksesibilitas memegang penting dalam upaya perkembangan wilayah sebab tanpa di dukung oleh sistem transportasi, sarana dan prasarana transportasi yang memadai, maka perkembangan suatu daerah akan sulit berkembang.

Kabupaten Pati memiliki 327 daerah irigasi dengan jaringan irigasi dalam kategori baik sepanjang 733.186,73 m dari total 854958,00 m atau 85,76 persen. Jaringan irigasi ini bertanggungjawab dalam pengairan 20.970 ha areal tanam. Penyediaan air baku yang terdiri dari air bersih dan air irigasi daerah mencapai 93,10 persen. Kebutuhan air irigasi selama tahun 2020 sebesar 502.751.182.500 untuk mengairi 20.965 ha, sedangkan kapasitas air irigasi 472.246.654.550 lt. Kapasitas air bersih Kabupaten Pati sebesar 20.760.543.000 lt, masih dibawah kebutuhan air bersih 27.155.737.200 lt.

**Evaluasi dan Analisa Kinerja**

Capaian kinerja meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah pada tahun 2020 sebesar 110,62 persen cenderung naik dari capaian kinerja 2019 sebesar 101,14 persen, melampaui dari target yang ditetapkan. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang didukung oleh Program pembangunan jalan dan jembatan, Program Peningkatan Jalan & Jembatan, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program pembangunan turap/talud/bronjong, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan Program koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah, dimana dalam pelaksanaan diberikan anggaran murni sebesar Rp147.869.305.100,00 yang kemudian dianggarkan kembali dalam anggaran perubahan sebesar Rp171.112.013.610,00 dan telah terealisasi sebesar Rp151.201.215.394,00 atau sebesar 88,36 persen, artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 11,64 persen.

**3.2.9 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Indek kualitas lingkungan hidup merupakan nilai kualitas lingkungan dari suatu kota/kabupaten yang terdiri dari kualitas air, udara dan tutupan vegetasi.

**Tabel 3.17**  
**Capaian Kinerja**

**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	58,35	53,88	92,34

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2020*

**Uraian Kinerja**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diukur dari 30 persen Indeks Kualitas Udara (IKU), 30 persen Indeks Kualitas Air (IKA), dan 40 persen Indeks Tutupan Lahan (IKTL). IKLH tahun 2020 sebesar 53,88 atau 92,34 persen dari target tahun 2020 sebesar 58,35.



Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pati pada tahun 2020 dihitung berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas. Udara disampling secara merata pada 21 titik seluruh Kabupaten Pati. Perhitungan IPU mengadopsi *EU Directives* yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU dengan Baku mutu udara ambien nasional (pengukuran 1 tahun) untuk NO<sub>2</sub> adalah 100 µg/m<sup>3</sup> dan SO<sub>2</sub> adalah 60 µg/m<sup>3</sup>. Parameter SO<sub>2</sub> didominasi berasal dari wilayah yang terkena dampak dari pemukiman, sedangkan parameter NO<sub>2</sub> didominasi oleh wilayah yang padat kendaraan bermotor. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pati tahun 2020 adalah sebesar 76,33.

Indeks kualitas air sungai Kabupaten Pati tahun 2020 adalah 32,86 yang dihitung dengan menggunakan parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Dissolved Oxygen (DO)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*. Untuk parameter *Fecal Coliform* dan *Total Coliform* kontributor, pencemar tidak dicantumkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Lokasi pengambilan sample tahun 2020 berlokasi 7 sungai dan 2 waduk yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Sungai tersebut melintas kota Pati, dan
- b) Sungai prioritas untuk dikendalikan pencemarannya, karena salah satu sungai merupakan salah satu sungai yang dijadikan sebagai salah satu Intake PDAM.
- c) Sungai yang berada di Klaster Tapioka yang ada di Kecamatan Margoyoso;
- d) Waduk Gunungrowo dan Waduk Seloromo yang merupakan intake PDAM.

Indek Tutupan Lahan Tahun 2020 dihitung berdasarkan jumlah luasan hutan lindung dan hutan produksi hutan primer, hutan sekunder dan perkebunan, pemakaman umum, sempadan jalan dan sungai serta RTH perkotaan. Nilai Indeks Tutupan Lahan tahun 2020 sebesar 48,44. Hasil perhitungan belum termasuk jumlah luasan tegalan dengan tanaman tahunan dalam proses perhitungan. Sedangkan IKTL tahun 2019 sebesar 44,31 dapat diartikan bahwa ada peningkatan sebesar 4,13 .

**Evaluasi dan analisa kinerja**

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Data**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

INDIKATOR KINERJA	Data 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2022
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	53,37	51,20	54,69	53,88	69,01

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2020

Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 cenderung menurun 0,81 poin dibandingkan pada Tahun 2019 yang sebesar 54,69. Penurunan terjadi pada IKU dan IKA sedangkan IKTL mengalami kenaikan. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020 sebesar 78,83 turun dibandingkan IKU tahun 2019 sebesar 78,83 yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah populasi kendaraan bermotor dan meningkatnya kegiatan industry. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 32,86 turun 11,54 poin dari tahun 2019 sebesar 44,40, sedangkan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) naik 4,13 persen dari 44,31 pada tahun 2019 menjadi 48,44 pada tahun 2020.

Gambar 3.2  
Aksi penanaman Mangrove di desa Kertomulyo kec. Trangkil



Yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tahun 2020 ada 4 program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program peningkatan pengendalian polusi dan Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) besar anggaran tahun 2020 Rp1.309.406.000,00 atau 0,22 persen dari total anggaran prioritas dan terealisasi sebesar Rp867.932.950,00 atau 93,39 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp929.408.700,00.

### 3.2.10 Menurunnya resiko bencana

Kenaikan dan penurunan resiko bencana dapat diketahui dari indeks resiko bencana. Semakin kecil nilainya maka resiko bencana semakin kecil. Tahun 2020 target Kabupaten Pati ditetapkan 154 terealisasi pada angka 94,27 atau tercapai 138,79 persen.

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Menurunnya resiko bencana

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penurunan Indeks Resiko Bencana	154	94,27	138,79

Sumber : BPBD Kabupaten Pati Tahun 2020

#### Uraian Kinerja

Diukur dengan indikator Penurunan Indeks Resiko Bencana. Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

**TABEL 3.20**  
**Kejadian Bencana Tahun 2020**

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	KERENTANAN		
			Kerugian	Kerusakan Lingkungan (Ha)	Jiwa terpapar (per km <sup>2</sup> )
1	Banjir	20	1.234.800.000	84	58
2	Tanah longsor	2	100.000.000	1	16
3	Kekeringan	28	51.500.000	280	20.807

*Sumber : BPBD Kabupaten Pati Tahun 2020*

Pada tahun 2020 ada 3 jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Pati, yaitu banjir, tanah longsor dan kekeringan. Kerugian yang diakibatkan sebesar Rp1.386.300.000,00 milyar rupiah dengan luas area 365 (ha), jumlah jiwa yang terpapar sebanyak 20.881 jiwa.

**Gambar 3.3**  
**Bencana Banjir di Desa Banjarsari Kecamatan Gabus - 21 Desember 2020**



**Gambar 3.4**  
**Bencana Tanah Longsor di Desa Gunungwungkal Kecamatan Gunungwungkal**  
**11 Desember 2020**



**Gambar 3.5**  
**Bencana Kekeringan di Desa Kedungmulyo Kecamatan Jakenan**  
**09 Oktober 2020**



### ***Evaluasi dan Analisa Kinerja***

**Tabel 3.21**  
**Perbandingan Indeks Resiko Bencana**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Data 2017</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Target 2022</b>
<b>Penurunan Indeks Resiko Bencana</b>	169	157,41	155	94,27	144

*Sumber : BPBD Kabupaten Pati Tahun 2020*

Kondisi awal perencanaan jangka menengah daerah RPJMD, indeks resiko bencana Kabupaten Pati tahun 2017 sebesar 169, sedangkan pada tahun 2020 indeks resiko bencana Kabupaten Pati sebesar 94, 27 mengalami penurunan dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja tahun 2020 sebesar 154 penurunan sebesar 59,73 poin. Penurunan indeks resiko bencana ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah kejadian bencana alam (banjir, banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Penurunan itu sebesar 59,73 poin. Perbandingan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan angka indeks resiko bencana tahun 2019 disebabkan karena angka kejadian bencana alam di Kabupaten mengalami penurunan, tahun 2020 bencana yang mengalami penurunan penilaian yaitu bencana kekeringan yang semula 91,35 poin sedangkan pada tahun 2020 sebesar 56,25 poin, untuk angka penilaian tingkat resiko bencana alam yang lainnya mengalami penurunan. Perbandingan tingkat resiko bencana banjir pada tahun 2020 sebesar 25 poin sedangkan pada tahun 2019 sebesar 49,19 poin, bencana tanah longsor tahun 2020 sebesar 13,02 tahun 2019 sebesar 14,64 poin.

Untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana telah dilakukan beberapa upaya yaitu : Bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana melaksanakan kegiatan pembangunan penyediaan air tanah untuk air baku pada daerah kekeringan di wilayah Kabupaten Pati yang didanai oleh BBWS Pemali Juwana berupa pembuatan sumur dalam di 6 lokasi. Sumur dalam ini diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan air bersih yang menjadi prioritas pada saat terjadi kekeringan.

**Tabel 3.22**  
**Pembuatan Sumur Dalam**

Tahun	Jumlah	Lokasi
<b>2019</b>	4	Desa Kropak, Kecamatan Winong
		Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong
		Desa Babalan, Kecamatan Gabus
		Desa Pantirejo, Kecamatan Gabus
<b>2020</b>	2	Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong
		Desa Sidomukti, Kecamatan Jaken

*Sumber : BPBD Kabupaten Pati Tahun 2020*

Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dimaksudkan untuk membentuk desa/ kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi

dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini diharapkan mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Desa tersebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana, memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan penurunan indeks resiko bencana di tahun 2020 didukung oleh Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang dianggarkan sebesar Rp787.205.350,00 yaitu 0,13% dari anggaran prioritas yang kemudian terealisasi Rp583.584.890,00 atau 96,01 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp607.841.250,00. Pencapaian kinerjanya 138,79 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 3,99 persen.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran murni sebesar Rp2.900.220.672.000,00 yang kemudian mengalami perubahan dalam APBD Perubahan menjadi Rp2.867.710.016.000,00 dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp1.837.556.206.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp1.030.153.810.000,00.

**Tabel 3.23**  
**Anggaran Belanja Daerah Perubahan**

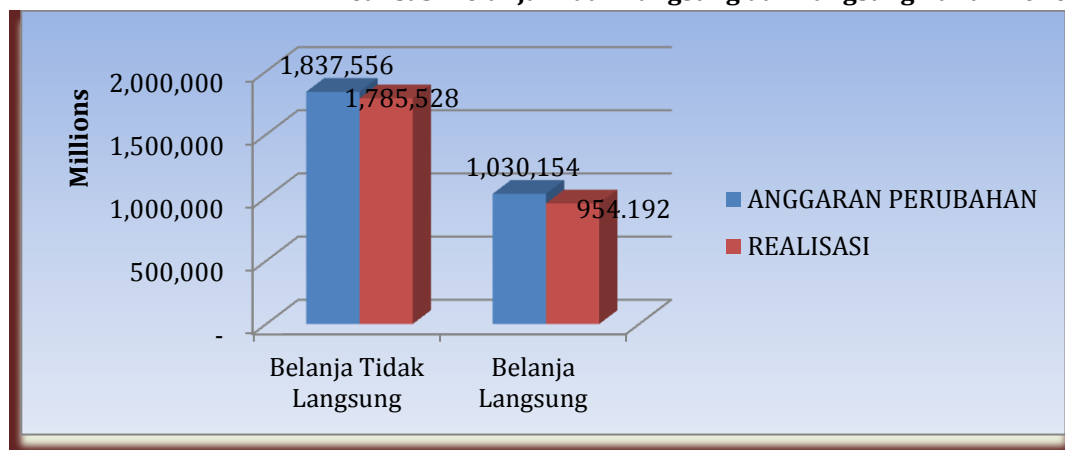
URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	%
Belanja Tidak Langsung	1.837.556.206.000	43,94
Belanja Langsung	1.030.153.810.000	56,06
Total Belanja	2.867.710.016.000	100,00

Sumber : Diolah dari Data BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2020

Total realisasi belanja 2020 sebesar Rp2.739.719.793.423,00 dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp1.785.528.270.267,00 dan belanja langsung sebesar Rp954.191.523.156,00.

**Grafik. 3.1**

**Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Tahun 2020**



Sumber : Diolah dari Data BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2020

Realisasi belanja untuk program-program prioritas sebesar Rp459.216.035.496,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terserap rata-rata 91,17 persen program/kegiatan di sasaran. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah menyerap anggaran tertinggi belanja prioritas (96,79%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ketiga yaitu Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia (67,43%).

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.24**  
**Realisasi Anggaran Belanja Prioritas (dalam rupiah) Tahun 2020**

NO	TUJUAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(%)
1	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	4.753.565.000	2.816.395.400	2.715.331.925	96,41
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	339.561.924.650	254.173.757.800	238.772.259.085	93,94
3	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	200.186.900	164.200.000	110.715.500	67,43
4	Penurunan tingkat kemiskinan	13.539.747.250	8.121.633.950	7.852.634.189	96,69
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	46.101.830.575	26.591.894.225	25.081.516.929	94,32
6	Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	3.237.691.500	1.750.146.050	1.546.144.231	88,34
7	Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	33.167.655.950	31.495.880.725	30.484.700.403	96,79
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	147.869.305.100	171.112.013.610	151.201.215.394	88,36
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.309.406.000	929.408.700	867.932.950	93,39
10	Menurunnya risiko bencana	787.205.350	607.841.250	583.584.890	96,01
	<b>TOTAL</b>	<b>590.528.518.275</b>	<b>497.763.171.710</b>	<b>459.216.035.496</b>	
			Rata-rata realisasi		91,17
			Realisasi tertinggi		96,79
			Realisasi terendah		67,43

Sumber : Diolah dari Data BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2020

## BAB IV PENUTUP

**P**enyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merujuk pada Rencana Strategis Kabupaten Pati 2017-2022 dalam mengelola kepercayaan masyarakat Kabupaten Pati.

Meskipun dalam suasana pandemi covid-19 penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Pati efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Pati kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja dari 14 indikator kinerja yang ditetapkan mencapai kategori sangat tinggi. Akibat pandemi wabah covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir, angka kemiskinan dan angka pengangguran mengalami peningkatan yang berdampak menurunnya pendapat perkapita masyarakat.

Sakip sebagai sistem diharapkan dapat memberikan sarana bagi pemangku kepentingan dalam mempertahankan kinerjanya. Hal yang dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan kinerja, Pemerintah Kabupaten Pati kedepan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara berkala atas Renstra Perangkat Daerah terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja, serta memanfaatkan hasil reviu untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur organisasi;
2. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, dan penganggaran sehingga dapat mengoptimalkan penerapan *performanced based budgeting* secara konsisten ditingkat Perangkat Daerah;



3. Memanfaatkan *cascading* kinerja dalam menyusun Perjanjian Kinerja di tingkat penanggung jawab program, kegiatan dan sub kegiatan serta melakukan *cascading* kinerja organisasi setiap Perangkat Daerah hingga ke level individu pegawai dan memanfaatkannya untuk pengukuran kinerja individu serta sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* sehingga mendorong terwujudnya system merit;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja baik ditingkat Pemda maupun Perangkat Daerah antara lain dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memastikan agar pimpinan Perangkat Daerah memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam memperbaiki perencanaan dan peningkatan kinerja;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah serta pimpinan Perangkat Daerah agar menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah;
6. Meningkatkan kualitas dan cakupan evaluasi program dengan mereviu program, kegiatan dan komponen anggaran pada seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan alokasi anggaran dapat fokus pada pencapaian sasaran strategis pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati tahun 2020 ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh *Stakeholder*. Dalam upaya akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dapat memberikan dampak lebih luas pada kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Pati mendatang, akan disempurnakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pati, 1 Maret 2021  
BUPATI PATI,



**HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.**



**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Jabatan : BUPATI PATI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pati, 18 Januari 2020

BUPATI PATI

  
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

<b>TUJUAN SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	<i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	63,13
2. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	<i>IPM</i>	71,41
3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	<i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	92,07
	<i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	69
4. Penurunan tingkat kemiskinan	<i>Tingkat kemiskinan</i>	9,18
	<i>Indeks Gini</i>	0,31
	<i>PDRB Perkapita</i>	35.730.568
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	<i>Indek Reformasi birokrasi</i>	64
6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	<i>Nilai PDRB ADHK ( = 000.000)</i>	32.097.152,01
7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	<i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,47
	<i>Inflasi Daerah</i>	3,5
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	74,32
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	58,35
10. Menurunnya risiko bencana	<i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	154

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Keluarga Berencana	Rp 7.052.437.500	APBD
2. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang ekonomi	Rp 729.429.000	APBD
3. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesra	Rp 4.067.365.000	APBD
4. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi dan SDM Pemerintah daerah	Rp 486.859.500	APBD
5. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang/jasa	Rp 1.041.933.000	APBD
6. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang Tata pemerintahan	Rp 1.536.579.000	APBD
7. Program koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah	Rp 281.971.550	APBD
8. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 980.821.000	APBD
9. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp 211.211.000	APBD
10. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Rp 22.788.296.000	APBD
11. Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp 299.724.000	APBD
12. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp 3.334.442.300	APBD
13. Program pembangunan turap/talud/bronjong	Rp 23.017.269.060	APBD
14. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Rp 487.908.000	APBD
15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 4.062.415.550	APBD

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
16. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Rp 48.644.000	APBD
17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp 2.592.948.400	APBD
18. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp 5.183.981.450	APBD
19. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Rp 811.750.000	APBD
20. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp 11.661.827.000	APBD
21. Program penataan struktur industri	Rp 87.318.000	APBD
22. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rp 498.000.000	APBD
23. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp 787.205.350	APBD
24. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp 1.025.000.000	APBD
25. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 1.825.000.000	APBD
26. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp 70.000.000	APBD
27. Program pengembangan budidaya perikanan	Rp 1.231.502.000	APBD
28. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp 19.940.643.190	APBD
29. Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp 1.128.671.225	APBD
30. Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp 569.954.000	APBD
31. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Rp 1.233.734.000	APBD
32. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 769.710.000	APBD
33. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Rp 16.079.248.000	APBD

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
dan Air Limbah		
34. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 6.701.708.525	APBD
35. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp 209.179.000	APBD
36. Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp 100.000.000	APBD
37. Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp 756.565.000	APBD
38. Program pengembangan perikanan tangkap	Rp 11.497.000.000	APBD
39. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Rp 148.207.000	APBD
40. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Rp 248.572.000	APBD
41. Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp 403.210.500	APBD
42. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp 1.047.707.500	APBD
43. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 512.417.000	APBD
44. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 92.624.700	APBD
45. Program Penguatan Pendidikan Karakter Siswa	Rp 180.000.000	APBD
46. Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Rp 153.650.000	APBD
47. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp 9.825.370.350	APBD
48. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp 8.321.767.000	APBD
49. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 208.794.550	APBD
50. Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Rp 83.215.049.500	APBD
51. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp 129.460.000	APBD
52. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 14.204.576.500	APBD
53. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 1.220.354.500	APBD

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
54. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp 3.617.573.700	APBD
55. Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp 176.884.000	APBD
56. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 1.112.045.000	APBD
57. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp 1.687.704.225	APBD
58. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2.737.496.000	APBD
59. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 1.139.675.500	APBD
60. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 14.552.083.000	APBD
61. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp 1.802.802.000	APBD
62. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Rp 76.395.000	APBD
63. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	Rp 73.971.000.000	APBD
64. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"	Rp 18.000.000.000	APBD
65. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"	Rp130.000.000.000	APBD
66. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp 342.500.000	APBD
67. Program peningkatan pengendalian polusi	Rp 599.235.000	APBD
68. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp 107.562.200	APBD
69. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp 432.759.250	APBD
70. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp 2.001.320.700	APBD
71. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 100.000.000	APBD
72. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 785.446.250	APBD

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
73. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp 5.415.130.500	APBD
74. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Rp 216.261.000	APBD
75. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp 653.250.000	APBD
76. Program perencanaan pembangunan daerah	Rp 1.605.691.750	APBD
77. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 127.754.000	APBD
78. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp 530.553.000	APBD
79. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 464.236.000	APBD
80. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 2.317.726.500	APBD
81. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 14.096.175.000	APBD
82. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 36.759.247.000	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 590.528.518.275</b>	

Pati, 18 Januari 2020  
BUPATI PATI

  
HARYANTO, S.H., M.M., M.SI.